

Vol. 71, No. 1, Tahun. XXXIV, Juli 2011

Dialog

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

MODERASI GERAKAN ISLAM

Terakreditasi C No:
362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM:
Prof. Dr. H. Abdul Djamil

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Drs. H. Asmu'i, M.Hum

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan
H. Wahyudi, S.Pd

SEKRETARIS REDAKSI
Dra. Hj. Astuty Nilawati

MITRA BESTARI

Prof. Dr. H. Komarudin Hidayat, MA
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, MA

DEWAN REDAKSI
Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud
Dr. H. Amin Haedari
Dr. H. Hamdar Arraiyah
Drs. H. Asmu'i, M.Hum

REDAKTUR EKSEKUTIF
M. Nasir, S.Th.I.

REDAKTUR PELAKSANA
Dra. Hj. Astuty Nilawati
M. Nasir, S.Th.I
Akmal Salim Ruhana, S.H.I
Abas Jauhari, MSi

ADMINISTRASI
Mulyadi
Dra. Hj. Aini Moerad
Willa Widdharari, M.Kom

ALAMAT REDAKSI
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama
Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271
fax.(021) 3920380

WEBSITE:
www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

PENGANTAR REDAKSI

MODERASI GERAKAN ISLAM

Islam merupakan agama yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pembentukan karakter suatu bangsa dan individu-individu yang ada di dalamnya. Peran Islam di Indonesia mulai menguat sejak abad 14 M, terutama pasca berdirinya kerajaan Samudra Pasai dan Demak. Kehadirannya, diyakini oleh para sejarawan, tidak merusak identitas lokal. Malah konversi penduduk lokal kedalam agama Islam tidak menyebabkan mereka menanggalkan tradisi

Jurnal Dialog Diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan, intelektual dan akademisi, untuk berdiskusi dan menulis secara bebas serta kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

lokal. Padahal dua kerajaan itu berdiri di daerah pesisir, di mana pengaruh penguasa-penguasa lokal tidak kuat. Logikanya, semakin kecil pengaruh kekuasaan elit-elit lokal, maka semakin besar kemungkinan tercabutnya tradisi lokal dalam proses konversi tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam yang tumbuh di Indonesia memiliki karakter yang moderat. Istilah moderat dalam konteks ini dapat didefinisikan toleran dan simpatik. Sebuah bentuk keberagamaan yang menghormati identitas kebudayaan dan tradisi pribumi.

Karakter toleran dan simpatik, serta menjunjung tinggi budaya lokal itulah yang sebetulnya mengakar kuat dalam perkembangan Islam selanjutnya. Meski pada perkembangan berikutnya muncul karakter lain, yaitu puritan, akibat dari dialektika dan perjumpaan intelektual Muslim Nusantara, terutama yang berasal dari daerah Aceh dan Sumatera Barat, dengan Muslim Haramain (Mekah dan Madinah). Kondisi ini terjadi seiring dengan persaingan politik antara Turki Utsmani dengan penguasa-penguasa Eropa di abad ketujuh belas Masehi. Kesamaan identitas agama dan ketegangan dengan bangsa Eropa mendorong menguatnya konsolidasi kekuatan antarpenguasa Muslim. Perkembangan Islam yang moderat ini disebutkan oleh John L. Esposito akan menjadi pendorong munculnya kawasan alternatif bagi kebangkitan Islam (1997). Kecenderungan ini mengeliminasi pan-

dangan pesimis yang menyatakan bahwa agama Islam akan menjadi penghambat modernisasi dan demokrasi, seiring dengan tumbuhnya Islam moderat di Indonesia.

Gerakan Islam moderat kontemporer memang dilatari oleh keprihatinan pasca tragedi 11 September 2001. Gerakan tersebut berupaya untuk mengklarifikasi opini yang berkembang di masyarakat Barat. Stigma terorisme itu sangat merugikan umat Islam. Padahal kesadaran umat Islam tidak tunggal. Pergulatan dan pengalaman hidup yang beraneka macam itu tidak memungkinkan munculnya keseragaman sebuah karakter keberagamaan. Kecenderungan aksi teror dilakukan oleh kelompok yang terbiasa dengan kondisi perang. Sebagaimana tergambar dalam latar belakang Amrozi cs, pelaku peledakan Bom di Bali, sebagian besar dari mereka adalah mantan pejuang dalam perang Afghanistan-Uni Soviet di tahun 1980-an.

Selain itu harus diakui adanya kekeliruan umat Islam dalam memandang konsep jihad. Sejauh ini konsep jihad itu sering digunakan untuk memicu sentimen anti Barat, bahkan kerap digunakan untuk legitimasi aksi teror. Situasi ini mendorong tokoh-tokoh Islam moderat untuk meredam laju "pesona" tafsir jihad yang tidak sejalan dengan misi kedamaian dan kemanusiaan dalam agama Islam.

Jadi gerakan Islam moderat kontemporer mengalami pergeseran concern—jika dibandingkan dengan gerakan

sebelumnya. Namun pergeseran itu tidak serta merta membuatnya berbeda sepenuhnya dengan gerakan Islam moderat lainnya. Mereka tetap memiliki titik temu, yakni pada komitmen terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Sebelumnya, istilah Moderat memang tidak pernah menjadi nama formal sebuah kelompok gerakan. Tokoh-tokoh Islam menggunakan istilah Islam moderat setelah memotret adanya kecenderungan baru yang khas, yakni pasca tragedi 11 September itu. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua ormas yang giat mengampanyekan gerakan moderat ini. Dapat dikatakan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah dua lembaga yang paling serius melawan gerakan terorisme. Oleh karena itu perkembangan Islam moderat di Indonesia sangat tergantung pada strategi dan program keduanya.

Dalam kajian Jurnal Dialog Edisi ini mencoba menyoroiti Moderasi Gerakan Islam di Indonesia yang belakangan gerakannya kian massif. Kajian Jurnal Dialog edisi ini diawali dengan tulisan Wahid Khozin yang menghadirkan tulisan tentang *Civil Society Dan Kerukunan Umat Beragama : Tawaran Pendekatan*. Dilanjutkan dengan tulisan Muhammad Nurkhoiron tentang *Modernitas Nahdlatul Ulama: "Bermain-Main Diantara Tradisi(Onal) dan Ke-Modern-An"*. Sedangkan Media Zainul Bahri menghadirkan tulisannya tentang *Cinta Kasih Agama-Agama: Hidup Bersama Tuhan Damai*

Bersama Manusia. Rahmatullah menghadirkan tulisan tentang *Islam Moderat dalam Perdebatan*. Kajian ini dilengkapi dengan tulisan Nanang Tahqiq, yang menulis tentang *Refleksi Untuk Moderasi Islam-Indonesia*. Evisopandi menghadirkan tulisan tentang *Geliat Pertentangan Fundamentalisme dan Liberalisme*. Kajian dalam Jurnal Dialog edisi ini kian lengkap dengan hadirnya tulisan Himawan Sutanto tentang *Proses Pembumihian Konsep Tajdid Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Modernis*.

Pada edisi ini juga dihadirkan hasil penelitian Ahmad Suaedy dari Filipina tentang PERGULATAN MINORITAS DALAM NEGARA HEGEMONIC: Studi Kasus Muslim Bangsamoro di Mindanao, Filipina Selatan dan Akmal Salim Ruhana tentang *Gerakan NII di Babakan Cipari dan Empat Pilar Kebangsaan*. Kajian ini diakhiri dengan telaah buku yang berjudul *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*. Buku ini mengulas gerakan Islam radikal yang tumbuh subur di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Semoga kajian yang dihadirkan Jurnal Dialog edisi ini memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca, khususnya dalam kajian Gerakan Islam Moderat di Indonesia. Selamat Membaca!

Redaksi

DAFTAR ISI

TOPIK

WAHID KHOZIN

CIVIL SOCIETY DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA : Tawaran Pendekatan --1

MUHAMMAD NURKHOIRON

MODERNITAS NAHDLATUL ULAMA: "BERMAIN-MAIN DIANTARA TRADISI(ONAL) DAN KE-MODERN-AN" --17

MEDIA ZAINUL BAHRI

CINTAKASIHAGAMA-AGAMA: HIDUP BERSAMA TUHAN DAMAIBERSAMA MANUSIA -- 30

RAHMATULLAH

ISLAM MODERAT DALAM PERDEBATAN --40

NANANG TAHQIQ

REFLEKSI UNTUK MODERASI ISLAM-INDONESIA --49

EVISOPANDI

GELIAT PERTENTANGAN FUNDAMENTALISME DAN LIBERALISME --65

HIMAWAN SUTANTO

PROSES PEMBUMIHAN KONSEP TAJDID MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN ISLAM MODERNIS --80

PENELITIAN

AHMAD SUAEDY

PERGULATAN MINORITAS DALAM NEGARA HEGEMONIC: Studi Kasus Muslim Bangsamoro di Mindanao, Filipina Selatan --92

AKMAL SALIM RUHANA

GERAKAN NII DIBABAKAN CIPARI DAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN --119

BOOK REVIEW

FIRDAUS KHALIMI

DINAMIKA GERAKAN ISLAM DI INDONESIA --141

GERAKAN NII DI BABAKAN CIPARI DAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN

OLEH: AKMAL SALIM RUHANA *)

ABSTRACT

This research was aimed to elaborate the profile of NII (Negara Islam Indonesia/ Indonesian Islamic State) movement in Babakan Cipari, Garut, and to scrutinize its views on Panca-sila, UUD 1945 (Indonesian constitution), Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity), and NKRI (Republic of Indonesia). In Indonesia NII has been one of controversial Islamic movement organizations from the Indonesian independence movement until today. Therefore, this research is interesting by showing the uniqueness of NII movement in Babakan Cipari as another variant of DI/NII movements, with some unique characteristics on religious thoughts and activities. In their perspectives, Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika are tolerable, while UUD 1945 (amendment) and NKRI are problematic and unacceptable. Enriched by interviews with some key-informant, this research was written based on a descriptive-analytic method with a qualitative approach.

Penelitian ini bertujuan mengelaborasi profil gerakan NII (Negara Islam Indonesia) di babakan Cipari Garut dan memaparkan pandangan-pandangannya terhadap Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di Indonesia NII merupakan organisasi gerakan Islam yang kontroversial dari gerakan kemerdekaan Indonesia, sampai sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini menarik dengan menunjukkan keunikan gerakan NII di Babakan Cipari sebagai varian lain gerakan-gerakan NII, dengan keunikan karakteristinya pada pemikiran dan aktivitas keagamaan. Dalam perspektif NII Babakan, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika bisa ditoleransi, sementara UUD 45 (amandemen) dan NKRI adalah sesuatu yang masih problematic dan tidak bisa diterima. Diperkaya dengan wawancara kepada beberapa informan kunci, penelitian ini ditulis berdasarkan atas metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif.

KEYWORDS

NII movement, Panca-sila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, and NKRI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia lahir dan berdiri kokoh di atas topangan empat pilar

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar-pilar itu adalah: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Segenap masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang dan cara pandangnya

*) Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

menyepakati Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tata kehidupan bernegara dan pemerintahannya, yakni UUD 45. Realitas keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama masyarakat tetap terikat dalam satu ikatan sebagai bangsa Indonesia (*bhinneka tunggal ika*). Demikian juga, kelompok masyarakat Indonesia yang tersebar dalam pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pilar inilah yang menjadikan Indonesia tetap ada dan berdiri tegak menggapai cita-cita masyarakatnya hingga saat ini.

Hanya saja, belakangan ini ada perkembangan mengkhawatirkan terkait kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama di Indonesia. Konflik bernuansa etnorelijius, gerakan separatisme, sikap radikalisme, dan tindakan intoleransi, terjadi di beberapa wilayah Indonesia.¹ Hal-hal itu muncul bersamaan dengan, atau disebabkan oleh, adanya beberapa ketimpangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta ihwal keagamaan. Salahsatu permasalahan

¹ Beberapa kasus itu misalnya gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka di Papua, konflik etnorelijius di Tanjung Priok, dan gerakan bawah tanah NII KW IX. Disamping itu, terjadi sejumlah tindakan intoleransi keagamaan di Indonesia 2009-2010. Hal ini misalnya dilaporkan CRCS, *The Wahid Institute*, *SETARA Institute*, dan *Moderate Muslim Society*, terkait gangguan terhadap sejumlah rumah ibadat yang kian meningkat. Selengkapnya lihat *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2011, hlm. 34; *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*, Jakarta: The Wahid, 2011, hlm. 17; *Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Jakarta: SETARA, 2011, hlm. 9.; dan *Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi*, Jakarta: Moderate Muslim Society, 2011, hlm. 12.

yang dewasa ini mengganggu stabilitas keajegan Indonesia itu ialah munculnya (kembali) gerakan Negara Islam Indonesia, NII. Gerakan ini, sesuai namanya, hendak menjadi sebuah 'negara' tersendiri padahal sudah berada di dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salahsatu gerakan itu kini ada dan berpusat di Babakan Cipari, Garut, Jawa Barat. Dengan dipimpin seorang presiden, Drs. Sensen Komara bin Bakar Misbah (47 th), gerakan ini memiliki struktur pemerintahan dan kabinet tertentu, diikuti oleh sejumlah warga pengikut, memiliki paham keagamaan dan ideologi, bahkan bendera tersendiri.² Selain mengklaim menjadi negara tersendiri, yakni Negara Islam Indonesia, komunitas ini juga tidak mau terlibat dalam proses politik di Indonesia, seperti Pemilu ataupun Pilkada.³ Bahkan, komunitas ini pernah menantang kelompok muslim di Kabupaten Garut dalam suatu sumpah '*mubalahah*'⁴ untuk meyakinkan bahwa mereka berada di jalan yang benar.

² Wawancara pada kajian permulaan dengan Syaikh Abdillah (45th), akademisi Kabupaten Garut, pada 3 Juni 2011.

³ Baca artikel "NII Menyebarkan ke Sejumlah Penjuru", H.U. *Pikiran Rakyat*, 16 Mei 2011, dalam <http://bataviase.co.id/node/677148> dirilis pada 3 Juni 2011.

⁴ *Mubalahah* adalah salah satu cara yang dilakukan dua kelompok berbeda pendapat untuk mempertahankan keyakinan mereka tentang satu masalah. Biasanya parapihak menyatakan kesediaan untuk mendapat hukuman dari Allah jika terbukti bohong atau salah. Dalam kasus ini, Drs Sensen menantang Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan Syariat Islam (LP3Syl), yang membantah keyakinan/ajarannya. Komunitas ini meyakini Sensen sebagai rasul dan menerapkannya dalam bacaan syahadat. Komunitas ini juga terang-terangan mengubah arah kiblat dari barat menjadi timur dan tidak lagi menjalani salat wajib lima waktu. Baca artikel "Aliran Sesat Sensen Tantang Mubalahah", *Pikiran Rakyat*, 23 April 2010 dalam <http://bataviase.co.id/node/182232>, dirilis pada 4 Juni 2011.

Mencermati fenomena unik gerakan NII pimpinan Drs. Sensen Komara ini, terdapat sejumlah kondisi problematik, sebagai berikut:

1. Sejauh penelusuran, gerakan NII pimpinan Drs. Sensen memiliki keterkaitan historis dan ideologis dengan gerakan NII yang pernah diproklamasikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (SMK) pada 7 Agustus 1949. Gerakan ini diakui Sensen sebagai “meneruskan” perjuangan SMK.⁵ Pengibaran bendera NII, keengganan ikut Pemilu/Pilkada, keberadaan struktur pemerintahan negara, dan hal lainnya, mengindikasikan secara kasat mata gerakan ini sebagai gerakan makar negara. Anehnya, sampai saat ini, ‘kampungan NII’ itu tetap eksis dan terkesan dibiarkan berkembang di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Maka, seakan-akan ada negara dalam negara, ada NII dalam NKRI.
2. Secara keagamaan, paham dan pengamalan keagamaan Islam komunitas NII ini pernah berbeda dengan umat Islam pada umumnya di Kabupaten Garut—yang dalam satu dan lain hal dapat digolongkan sebagai penodaan agama. Ajaran itu adalah tentang pengangkatan Drs. Sensen

⁵ Hal ini dinyatakan Sensen dalam wawancara dengan *Tempo*, bahwa dirinya “...melanjutkan perjuangan Bapak (SMK, *pen.*)” Demikian juga gerakan NII Sensen sebagai bagian dari Darul Islam (DI) Fillah, faksi NII pascameninggalnya SMK. Selanjutnya baca “Negara Setengah Hati,” dalam <http://www.tempointeraktif.com/khusus/selur/kartosowirjo/page23.php>, dirilis 4 Juni 2011. Meski demikian, dalam perkembangannya, sejumlah informasi menunjukkan adanya pergeseran paham keagamaan NII versi Sensen dari NII versi SMK. Bahkan, Syaik Abdillah berpendapat bahwa NII Sensen adalah NII baru dan berbeda sama sekali dengan NII SMK, selain adanya hubungan dalam hal cita-cita mendirikan negara Islam. Wawancara-pendahuluan dengan Syaik pada 4 Juni 2011.

sebagai rasul dan menyebutkannya dalam kalimat syahadat, mengubah arah kiblat dari barat ke timur, puasa wajib di luar Ramadhan, dan tidak lagi menjalani salat wajib lima waktu. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu kerukunan umat beragama.

3. Gerakan NII ini mengklaim menjadi negara tersendiri, yang memiliki ideologi, struktur, bendera, dan warga tersendiri, sedangkan eksistensinya berada di wilayah Indonesia, maka sejatinya mereka terikat hukum dan aturan Indonesia. Di sisi lain, Indonesia ditopang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan konsep NKRI. Dua kondisi ini berhadapan-diametral secara konseptual.

Mencermati berbagai informasi dan kondisi di atas, maka penelitian ini sangat penting dilakukan. Selain untuk menjawab kondisi kehidupan kekinian, penelitian ini sangat strategis, relevan, dan bernuansa *policy research* dalam kerangka kebijakan Pemerintah. Sebagaimana ditegaskan di dalam RPJMN 2010-2014, bahwa permasalahan pembangunan di Indonesia saat ini antara lain masih rendahnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat. Selain itu, masih terjadi kesenjangan antara pemahaman agama dengan perilaku sosial dalam kerangka pembangunan nasional. Penelitian ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat yang toleran dan selaras dengan wawasan kebangsaan, HAM, gender, dan kebhinnekaan.⁶ Untuk

⁶ Selengkapinya dalam Lampiran PP No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, pada Buku II Bab II

itulah, penelitian ini menemukan konteks dan urgensinya.

B. Permasalahan

Berdasarkan gambaran di atas, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya pandangan gerakan NII di Babakan Cipari, Garut, tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebelumnya, perlu dijelaskan jatidiri gerakan NII di Babakan Cipari—selain untuk membantu memahami posisi-posisi pendapatnya nanti, juga agar tidak *misleading* mengenai NII versi mana yang diteliti. Untuk itu, disusun beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana profil keorganisasian dan keagamaan gerakan NII di Babakan Cipari, Garut?
2. Bagaimana pandangan gerakan NII di Babakan Cipari, Garut, tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui profil keorganisasian dan keagamaan gerakan NII di Babakan Cipari, Garut.
2. Mengetahui pandangan gerakan NII di Babakan Cipari, Garut, tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara akademik, bagi kalangan peneliti dan akademisi, penelitian ini berguna untuk memperkaya bahan bacaan (*reference*) kajian di bidang gerakan keagamaan, khususnya terkait

gerakan NII. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Kementerian Agama, terutama dalam upaya peningkatan wawasan keagamaan masyarakat yang toleran dan selaras dengan wawasan kebangsaan Indonesia, serta upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, penelitian ini dapat berkontribusi untuk suatu kebijakan yang tepat dan kredibel.

D. Definisi Operasional

Kata 'gerakan' yang disandingkan pada NII menunjukkan sifat yang dimilikinya. Secara umum, kata 'gerakan' dapat bermakna banyak: perbuatan atau keadaan bergerak, usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial (politik, dan sebagainya). Dalam konteks penelitian ini, gerakan berarti sifat dinamis ke arah penggalangan dukungan atau aktivitas keorganisasian.

NII dalam penelitian ini menunjuk pada gerakan Negara Islam Indonesia (penerus NII SMK dari faksi DI Fillah) yang berpusat di Babakan Cipari, Garut, yang dipimpin oleh Drs. Sensen Komara bin Bakar Misbah. Hal ini perlu ditegaskan karena asosiasi masyarakat tentang terma NII bisa berbeda. Wacana yang berkembang dalam media belakangan ini, misalnya, menunjuk pada NII yang melakukan cara cuci otak dalam perekrutan anggota, yang beberapa pihak menengarai keterkaitannya dengan Ma'had al-Zaytun. Adapun mengenai apa dan bagaimana sesungguhnya NII di Babakan Cipari itu justeru menjadi salahsatu yang akan dijelaskan oleh penelitian ini. Untuk kemudahan penyebutannya NII di Babakan Cipari ini, selanjutnya dapat disebut NII Sensen.

Pandangan, secara etimologis, dapat berarti amatan, pantauan, opini, pen-

tentang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, hlm. II.2-48 s.d. II.2-53.

dapat, pendirian, dan pikiran. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud pandangan adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap objek yang dicermati. Tepatnya pemberian arti dan makna terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI oleh NII Sensen.

Empat pilar berbangsa dan bernegara, atau kerap disingkat empat pilar kebangsaan, adalah suatu konsep tentang elemen-elemen dalam bangsa Indonesia yang harus ada dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar itu adalah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia, yang berisi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara substansial kelima prinsip itu adalah menyangkut ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebagai pedoman pelaksanaan kelima pasal tersebut, terdapat sebanyak 45 butir pedoman pengamalan Pancasila sesuai Tap MPR No. II/MPR/1978. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum tertulis dasar (*basic law*) yang menjadi acuan bagi peraturan perundangan lain di bawahnya.⁷ Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Indonesia, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan

untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah konsep tentang kesatuan administratif pemerintahan negara Indonesia, meskipun terbagi atas sejumlah pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di berbagai daerah.

E. Kerangka Konseptual/Teoritik

Penelitian ini pada pokoknya ingin mengetahui jatidiri NII di Babakan Cipari dan pandangannya atas eksistensi dan substansi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. NII di Babakan Cipari sendiri dapat dilihat sebagai gerakan/organisasi politik sekaligus gerakan keagamaan. Sebagai gerakan politik, sebuah 'negara', maka elemen pendukungnya adalah organisasi, perangkat (pimpinan dan warga), sistem/aturan, dan wilayah kekuasaan. Borgatta menyebutkan *the term "state" denotes the complex of organizations, personnel, regulations, and practices through which political power is exercised in a territory*.⁸ Georg Jellinek⁹ menyebut negara sebagai organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Sedangkan Georg W. F. Hegel¹⁰ melihat negara sebagai organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

Jika dilihat sebagai sebuah gerakan keagamaan, NII Sensen ini dapat di-

⁷ Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, pada Pasal 7 Ayat (1) disebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni: 1. UUD 1945, 2. UU/Perpu, 3. Peraturan Pemerintah, 4. Peraturan Presiden, dan 5. Peraturan Daerah.

⁸ Edgar F. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology*, USA: McMillan, 2000, bagian "The State" hlm. 2996.

⁹ Baca dalam <http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Georg+Jellinek>, dirilis pada 5 Juni 2011.

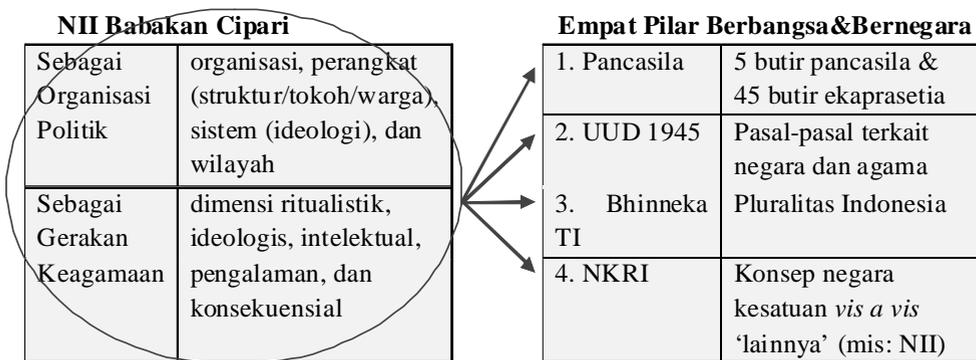
¹⁰ GWF. Hegel, *The Philosophy of History*, Canada: Batoche Books, 2001.

identifikasi melalui dimensi-dimensi religiusitas yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan Glock dan Stark,¹¹ ada lima dimensi religiusitas, yaitu: a. *religious practice* (dimensi ritualistik), sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban ritual di dalam agamanya; b. *religious belief* (dimensi ideologis), sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya. Misalnya kepercayaan tentang adanya Tuhan, malaikat, kitab-kitab, dan rasul; c. *religious knowledge* (dimensi intelektual), seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya; d. *religious feeling* (dimensi pengalaman), tentang pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dirasakan dan dialami; e. *religious effect* (dimensi konsekuensial), sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupannya.

Secara teoritik, gerakan keagamaan merupakan respon terhadap perubahan sosial, kultural, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup. Tahapannya dimulai dengan: adanya tokoh, interpretasi teks/konteks, penyebaran ajaran, pelembagaan ajaran (institusionalisasi), pengorganisasian, perlawanan terhadap tatanan yang ada, dan membawa pada perubahan.¹²

Menurut Imam Tholkhah dan Abdul Azis,¹³ asal usul gerakan keagamaan, setidaknya bersumber dari empat faktor laten. *Pertama*, pandangan tentang pemurnian agama yang tidak hanya terbatas kepada praktek keagamaan, melainkan juga pemurnian atas sumber agama itu sendiri. *Kedua*, dorongan untuk mendobrak kemapanan paham keagamaan *mainstream* yang berkaitan dengan kebebasan setiap muslim untuk menjadi pemimpin bagi dirinya dalam memahami ajaran Islam dan tidak terikat kepada taklid buta dalam bentuk apapun. *Ketiga*, pandangan tentang sistem kemasyarakatan yang diidealisasikan, seperti kepemimpinan tunggal di bawah seorang Amir, atau sistem *ummatan wahidatan*. Dan *keempat*, sikap terhadap pengaruh Barat seperti modernisme, sekulerisme, kapitalisme, dan lain-lain. Dalam hal ini Islam ditempatkan sebagai alternatif yang mengungguli paham atau ideologi tersebut.

Posisi-posisi NII sebagai organisasi politik dan organisasi keagamaan tersebut di atas, dihadapkan pada eksistensi dan substansi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Berikut kerangkanya:



¹¹ Glock and Stark dalam Poloutzian, F.R., *Psychology of Religion*. Massachusetts: A Simon & Schuster Comp., 1996.

¹² Selanjutnya baca Syafii Mufid, "Religious Studies: Approaches And Methodology", slide bahan ajar.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait gerakan NII atau Darul Islam telah cukup banyak dilakukan. Misalnya, yang pertama kali, dilakukan Cees van Dijk. Dalam bukunya *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, van Dijk menjelaskan secara baik gerakan NII Kartosoewirjo—pada periode awal hingga kematian gerakan ini.¹⁴ Kajian serupa dilakukan Holk H. Dengel dalam *Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo: Angangan yang Gagal*¹⁵, yang memberi gambaran cukup komprehensif tentang perjalanan pergerakan Kartosuwiryo dan cita-cita Darul Islam-nya. Kajian serupa yang muncul pasca reformasi, dilakukan Al-Chaidar dalam *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*, Jakarta: Darul Falah, 1999.¹⁶ Dalam bukunya ini, Al Chaidar seakan menjadi juru bicara SMK, dengan menyertakan sejumlah dokumen penting dalam lampirannya. Selain itu, Widjiono Wasis, dalam bukunya *Geger Talangsari: Serpihan Gerakan DI*¹⁷ mengkaji kasus Talangsari yang secara substansial dan aspirasional merupakan letupan gerakan DI di masa Orde Baru. Penelitian tentang NII atau DI yang terbaru dilakukan oleh Solahudin dan Ahmad Syafii Mufid. Solahudin dalam bukunya *NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*,¹⁸ memberi-

kan uraian yang cukup lengkap tentang gerakan DI hingga JI dengan segala metamorfosa gerakannya. Sedangkan Ahmad Syafii Mufid menyuguhkan kajian tentang gerakan radikalisme yang berhulukan gerakan NII/DI dan perkembangan gerakannya hingga menjadi Jamaah Islamiyah, dalam disertasinya berjudul *Radikalisme Al Jama'ah Al Islamiyah: Diskursus Politik*.¹⁹

Adapun kajian terkait empat pilar kebangsaan, sejauh penelusuran, terutama hanya terkait Pancasila. Kajian itu misalnya dilakukan Faisal Ismail tentang proses penerimaan muslim atas Pancasila. Dalam disertasinya berjudul *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: a Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila* itu²⁰, Faisal memberi gambaran bagaimana respon penerimaan muslim Indonesia terhadap Pancasila pada suatu masa yang tidak selalu mudah. Termasuk dalam kajian Pancasila adalah kajian oleh Adian Husaini dalam bukunya berjudul *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*.²¹ Dalam bukunya ini, Adian melakukan protes sejarah atas kesalahpahaman dan penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945-2009.

Dari sejumlah kajian terdahulu tersebut di atas, belum ada kajian atau penelitian yang secara khusus melihat kaitan gerakan NII dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, sejauh penelusuran, belum ada literatur yang mengulas tentang varian

¹³ Abdul Azis, *Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004. hlm. 2-3.

¹⁴ C van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

¹⁵ Holk H. Dengel, *Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo: Angangan yang Gagal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011, Cet.II.

¹⁶ Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*, Jakarta: Darul Falah, 1999.

¹⁷ Wasis, Widjiono, *Geger Talangsari: Serpihan Gerakan DI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

¹⁸ Solahudin, *NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2011.

¹⁹ Ahmad Syafii Mufid, *Radikalisme Al Jama'ah Al Islamiyah: Diskursus Politik*, disertasi pada UIN Yogyakarta, 2011.

²⁰ Faisal Ismail, *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: a Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila*, Disertasi, McGill University, 1995.

²¹ Adian Husaini, *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

DI/NII pimpinan Sensen Komara ini. Maka di sinilah distingsi penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada Juni 2011 di Garut, Jawa Barat, dengan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan/dokumen dan pengamatan lapangan serta wawancara. Studi pustaka dilakukan atas sejumlah referensi/dokumen terkait dan informasi dunia maya. Diantara dokumen-internal penting adalah *Argumentasia* dan *Kacamata Sunnah*, yang merupakan penjelasan resmi gerakan NII Babakan Cipari atas sejumlah hal. Pengamatan lapangan dilakukan dengan langsung mengunjungi 'kampung NII' di Babakan Cipari, Garut, serta sejumlah lokasi lainnya. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap kalangan internal dan eksternal gerakan NII. Dari internal, beberapa informan kunci yang berhasil diwawancarai adalah: Drs. Sensen Komara, Presiden NII; DM, Mendagri NII; LH, Menteri Bappenas NII; DRS, Mensesneg NII; serta M dan D warga NII. Sedangkan dari kalangan eksternal, beberapa yang diwawancarai adalah: AF, mantan lurah Babakan Cipari; H, pemuka agama di sekitar 'Istana Negara NII' di Babakan Cipari; S, warga Babakan Cipari non-NII; serta SA, akademisi Kabupaten Garut. Selain itu, sejumlah aparat pemerintah di daerah juga dijadikan informan, yakni: beberapa pejabat Kementerian Agama Kab. Garut; staf Kesbanglinmas Kab. Garut; Kasi Intel, Kasi Pidum, dan JPU di Kejaksaan Negeri Garut; seorang pejabat di Kepolisian Resort Garut dan di Kodim 0611 Garut, serta kepala dan penyuluh KUA Kecamatan Pangatikan, Garut.

Dalam menganalisis data digunakan Analisis Data Kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982)²², yakni dengan mengorganisasikan data dari penelusuran pustaka, dokumen dan wawancara; lalu memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dalam suatu *outline*; mensintesiskannya dengan kerangka tertentu; mencari dan menemukan pola serta menemukan apa yang penting; dan akhirnya memutuskan apa yang dapat ditulis dalam makalah/laporan.

Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain. Informasi yang diterima dari kalangan internal NII Babakan Cipari, misalnya, dihadapkan dengan informasi pihak eksternal, dan atau sebaliknya. Demikian pula, informasi dari buku dan dokumen diverifikasi dengan peninjauan objek kajian dan wawancara sejumlah pihak, dan atau sebaliknya.

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sekilas Kabupaten Garut

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.066,88 km², dengan jumlah penduduk 2.504.237 jiwa (*Garut Dalam Angka 2009*), dan kepadatan penduduk 8.494 orang/km². Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di Utara, Kabupaten Tasikmalaya di Timur, Samudera Hindia di Selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di Barat. Kabupaten Garut terdiri atas 42 kecamatan, yang dibagi lagi atas 420 desa dan 19 kelurahan. Secara geografis Kabupaten Garut merupakan daerah penyangga ibukota provinsi Jawa Barat.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 248.

Posisi ini cukup strategis baik sebagai pemasok kebutuhan ibukota provinsi maupun dalam pengembangan pariwisata alam yang dimilikinya, seperti Taman Wisata Cipanas dan beberapa penorama pegunungan yang mengelilingi kota.

Di bumi parahiyanan ini, etnis Sunda mendominasi komposisi kependudukan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Suasana ramah dan penuh keakraban menjadi karakter utama masyarakat di wilayah ini. Meski demikian, sentuhan modernisasi telah banyak menghiasi wajah kota dan gaya hidup masyarakat, terutama di daerah perkotaannya.

Kabupaten Garut dipimpin oleh pasangan Bupati H. Ceng Fikri, dan Wakil Bupati Dicky Candra, yang memimpin kabupaten ini melalui jalur independen (non partai). Adapun komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Garut berdasarkan fraksinya adalah sebagai berikut: Demokrat 10 kursi, PPP 7 kursi, Golkar 6 kursi, PDIP 6 kursi, PKS 5 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 4 kursi, serta Gabungan (Gerindra, PKB, dan PBB) 6 kursi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut, yang memiliki PDRB Rp 6.984.822 pada tahun 2006, secara umum relatif masih rendah. Menurut catatan Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Garut pada Tahun 2009, jumlah KK berdasarkan strata kesejahteraan keluarga, sebagai berikut: Keluarga Pra Sejahtera 183.375 KK, Keluarga Sejahtera I 181.925 KK, Keluarga Sejahtera II 165.625 KK, Keluarga Sejahtera III 84.423 KK, dan Keluarga Sejahtera III Plus 6.012 KK.²³ Namun demikian,

²³ www.pemkabgarut.go.id dirilis pada Juni 2011.

Kabupaten Garut terus memaksimalkan potensinya, terutama dari sektor andalan yang dimilikinya, yakni pertanian dan perdagangan, termasuk pariwisata.

B. Kondisi Kehidupan Keagamaan²⁴

Komposisi pemeluk agama dan rumah ibadat di Kabupaten Garut adalah: Islam 2.198.470 jiwa (96,96%) dengan 4.344 masjid.; Kristen 1.098 jiwa (0,05%) dengan 19 gereja; Katolik 2.622 jiwa (0,116%) dengan 2 gereja; Hindu 419 jiwa (0,018%) namun belum ada data jumlah pura; Buddha 5.645 jiwa (0,25%) dengan 2 vihara; dan agama lainnya 58.607 jiwa (2,6%).

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Kabupaten Garut memiliki banyak organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam, yakni: Syarikat Islam, Darul Arqam, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, LDII, dan lain-lain. Selain itu, di Kabupaten Garut terdapat 2.553 ulama, 3.926 mubalig, 44 penyuluh, dan 872 pesantren. Sementara itu di Kecamatan Pangatikan, lokasi dimana Desa Babakan Cipari berada, terdapat 38.243 warga muslim dengan 40 masjid dan 162 mushala.

Di Garut terdapat Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan Syariat Islam (LP3SyI) yang dibentuk untuk menyalurkan aspirasi masyarakat muslim Garut dalam penerapan syariat Islam di Garut. Lembaga yang terbentuk pada 15 Maret 2002 ini bertujuan mengkaji dan mempersiapkan pelaksanaan penerapan syariat Islam di Garut. Kala itu, di

²⁴ Data diambil dari *Buku Saku Statistik Jawa Barat 2010*. Data lain ditemukan dalam *Garut Dalam Angka 2009*, namun dalam beberapa hal data pada sumber informasi tersebut berbeda, misalnya tentang jumlah penduduk, pemeluk agama, dan rumah ibadat. Penelitian ini menggunakan kedua sumber data secara komplementatif-selektif.

Indonesia tengah mengemuka wacana formalisasi syariat Islam. Hanya saja, gerakan ini terkesan layu sebelum berkembang di tengah dinamika sosio-politik masyarakat Garut belakangan ini.²⁵

III. TEMUAN PENELITIAN

A. Gerakan NII di Babakan Cipari, Garut

1. NII sebagai Organisasi (Negara?)

Gerakan ini menyebut dirinya Darul Islam (DI) Fillah atau Negara Islam Indonesia (NII). Nama-nama ini cukup seksi dan mengundang perhatian para pengkaji gerakan Islam. Maklum, nama-nama itu mengingatkan mereka pada sejarah Indonesia tentang pemberontakan kelompok Islam yang bercita-cita mendirikan negara Islam di bumi nusantara pada 1950-an, DI/TII. Kelompok yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo (SMK) itu memang bergerak dan berbasis di Garut, Jawa Barat. Tak salah jika asosiasi pembaca langsung tertuju pada cerita sejarah itu dan mengaitkannya pada keberadaan NII di Babakan Cipari, Garut, sekarang ini.

Tak salah, NII di Babakan Cipari memang kelanjutan dari gerakan DI pimpinan Kartosoewiryo yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Ada kaitan historis dan ideologis antara keduanya. Bahwa setelah Kartosoewiryo wafat pada tahun 1962, dalam perkembangannya DI terbagi atas dua faksi. Faksi pertama, DI Fillah, yang meneruskan perjuangan dengan pola dakwah untuk menyelamatkan para mujahidin,

seraya menyatakan 'kembali' ke pangkuan RI. Kelompok ini dipimpin Djaja Sudjadi. Faksi kedua, DI Fisabilillah, yang meneruskan perjuangan dengan perlawanan fisik. Kelompok kedua ini sempat *vacuum* hingga 1968, dipimpin Daud Beureuh (sejak 1973), Adah Djaelani (sejak 1979), dan Abu Toto (sejak 1996).²⁶ Secara kronologis, berikut *time line* dari gerakan DI/NII sejak pasca meninggalnya SMK hingga masa tahun 2000-an.²⁷

- 1962 • SMK dieksekusi, Gerakan DI/TII mati (suri)
- Pimpinan-pimpinannya diberi 'pembinaan' oleh Pemerintah, pengikut/warga diberikan amnesti massal, dan sebagiannya diikutkan program transmigrasi ke berbagai daerah.
- 1965 • Terjadi huru-hara politik. Ada rencana kudeta terhadap Soekarno. Dalam perkembangannya menjadi Gerakan PKI (G 30/S/PKI).
- Eks-tentara DI dilibatkan menumpas PKI/komunis...bahwa DI sangat anti-komunis. • Setelah selesai, sebagai bagian dari kompensasi, beberapa pimpinan eks-DI diberi imbalan:

²⁵ Selengkapnya baca Moeftich Hasbullah, "Gerakan Syari'at Islam di Garut: Demokrasi Meluas, Syari'at Menyempit," *KHAZANAH*, Jurnal Ilmu Agama Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Vol.3 No.10, Juli-Desember 2006.

²⁶ Menariknya, sejumlah menteri NII yang diwawancarai menyatakan tidak mengetahui tentang DI Fisabilillah. "Yang saya tahu hanya DI Fillah," demikian misalnya dikatakan LH. Demikian juga DRS yang dengan tangan terbuka diwawancarai, namun kerap menyatakan 'tidak tahu' untuk hal-hal yang berkaitan dengan DI Fisabilillah. Istilah faksi DI *Fillah* dan *Fi Sabillillah* sendiri mulai muncul pada 1968 dan kemudian 1971, ketika Djaja Sudjadi keluar dari jajaran eks-DI secara umum, pasca pertemuan Reuni Situaksan.

²⁷ Direkabahasakan berdasarkan Solahudin, *op.cit.*, hlm. 81-115.

- penyalur minyak, staf di BAKIN, kemudahan usaha, dll.
- Tidak semua eks-NII nyaman dengan hubungan 'kooperatif' ini.
- 1968 • Setelah melakukan refleksi terhadap pesan terakhir SMK tentang "ini masa Hidayyah", Djaja Sudjadi mulai mewacanakan 'Jihad Fillah' dan merajut eks warga DI + rekrut baru.
- Mulai disiapkan gerakan persiapan memasuki masa "*Futuh Makkah*"
- 1969-1970 • Bersama Djaja, Aceng Kurnia mengkonsolidasikan para eks-DI.
- Meski sebelumnya menghadapi hambatan, akhirnya berhasil meyakinkan bekas petinggi DI untuk "melanjutkan perjuangan".
- 1971 • Diadakan REUNI eks-DI di Situaksan, Bandung (21/4/1971).
- Ribuan eks-DI/NII bertemu, (dikesankan) dalam rangka mendukung Golkar dalam Pemilu... padahal juga merupakan konsolidasi untuk kelanjutan perjuangan DI.
 - Problemnya, dana. Djaja menolak bantuan BAKIN, sebagaimana ditawarkan Danu. • **Djaja akhirnya memilih jalan sendiri, *DI Fillah*.**
- 1972 • Aceng Kurnia berkonsolidasi ke Aceh, menemui Tgk. Daud Beureuh. Juga dengan RPI, Sulawesi.
- 1973 • Pertemuan Mahoni, yang berhasil merajut dan mempertemukan eks-DI/TII tiga wilayah (Jawa-Aceh Sumatera-Sulawesi).
- Pertemuan menyepakati mengangkat Daud Beureuh menjadi imam pelanjut SMK.
 - Lalu, dilakukan sosialisasi hasil Pertemuan Mahoni.
- 1974 • Pertemuan di Sigli, membahas hasil sosialisasi.
- Daud Beureuh mulai menyatakan: "Siapkan kader, siap perang..."
- 1975 • Gaos Taufik menyiapkan kader pelatihan militer di Tanjung Priok, termasuk kursus bom.
- Ada rencana membom Soeharto, tapi urung. Gaos dkk meminta dana dan senjata jihad ke Libya. Daud Beureuh ke Kedutaan Libya di Kuala Lumpur. Sementara itu, Danu, dkk 'mengondisikan' Indonesia.
 - Akhir 1975, membuat struktur NII (Maklumat NII No.11)—struktur perang semesta.
- 1976 • Struktur NII sudah hampir terisi penuh sesuai Maklumat No.11/APNII.
- Muncul semangat jihad terhadap Pemerintah Indonesia. Problemnya dana.
 - Untuk memancing dana Libya, dibuat aksi-aksi teror. Pembakaran gereja di Medan, granat saat MTQ, bom Bioskop, dll.
- 1977 • Lobi Libya dikabarkan berhasil. Aksi di Aceh siap dimulai. Aceng menyiapkan Pasukan Berani Mati di Jabar, dan pasukan sabotase oleh Hispran di Jatim. Mereka menanti komando... "Perintah Komando Takbir".
- Komando dari Daud tak kunjung ada karena ternyata Daud

- berselisih dengan Hasan Tiro, yang akhirnya Tiro membuat GAM. Bantuan senjata dikuasai Tiro.
- Aparat mencium dan menciduk gerakan-gerakan Komando Jihad (1970-1976) ini.
 - (Mei 1977) beberapa eks-DI kabur dari represi aparat. Mereka bertemu di Tj. Priok dan diminta hijrah mencari tempat aman. Lalu mengadopsi 'perjuangan bawah tanah', sistem sel, dan penggunaan nama alias.
- 1978 • Reorganisasi DI. Posisi imam kosong, karena Daud Beureuh ditahan rumah di Jakarta.
- Siapa imam? Terjadi perebutan pengaruh antara Adah Djaelani dan Aceng Kurnia.
- 1979 • Diadakan pemilihan Imam NII. Adah 10, Aceng 1. Tersusun struktur baru DI/NII di bawah Adah Djaelani. Ada perselisihan Aceng-Ules soal format struktur.
- Adah memerintahkan pencarian dana dengan *fa'i* atau perampokan. Untuk itu, Ules 'memakai' Warman, eks-DI Sumatera.
 - Dilakukan aksi *fa'i* di Jawa Barat dan Jawa Tengah oleh Warman, dkk. Berhasil merampok rumah pegawai Pemerintah. Sayang, Warman dkk tertangkap di Malang. Jaringan di DI Yogyakarta pun terbongkar.
 - Selain sebagai Tim Fai., Warman ditugaskan membunuh para pengkhianat gerakan DI.
 - **Djaja Sujadi dibunuh** karena dianggap (pengkhianat) yang melaporkan faksi DI Fisabilillah ke aparat kepolisian. Di sisi lain, suatu versi mengatakan, pembunuhan ini dikarenakan rivalitas kepemimpinan DI dengan Adah Djaelani.
- 1980 • Syarif Hidayat melakukan *fa'i* dan berhasil besar di Jawa Barat. Hanya kemudian terbongkar, dan diciduk aparat.
- Aparat dengan Operasi Sapu Jagat memburu para pelaku.
 - Adah dkk hijrah ke Jakarta, konsolidasi di Tangerang. Di buat struktur baru ke sistem direksi, sistem sel, *tandzim sirri* (organisasi rahasia).
- 1981 • Sistem sel menggunakan istilah 'majelis taklim'.
- Aparat keamanan tetap mencium gerakan ini dan melakukan serangkain penangkapan.
 - (23 Juli) pengerebekan di So-reang mendapat perlawanan, dan aparat menembak sejumlah orang termasuk Warman.
 - Penangkapan para petinggi DI melumpuhkan gerakan DI.
- 1987 • Konsolidasi eks-DI, mengangkat Ajengan Masduki
- 1993 • Setelah '*imtishol*' yakni perpindahan karena perbedaan pandangan tentang sesuatu hal, Abdullah Sungkar yang baru kembali dari pelarian di Malaysia kemudian membuat Jamaah Islamiyah (JI).
- 2000-an • Terjadi aksi-aksi terorisme di tanah air dan selalu dikaitkan anasir DI/NII.
- Dari kronologis di atas, tentang faksi DI Fillah, ketika Djaja Sudjadi wafat pada 1979, tampuk kepemimpinan lalu di-

pegang H. Bakar Misbah, sebagai mantan Bupati Militer NII-Sumedang kala itu. Setelah Bakar Misbah wafat pada tahun 1993, Drs. Sensen Komara, anak kandung Bakar Misbah, kemudian didaulat para pengikut setia DI Fillah untuk memimpin dan membimbing mereka.²⁸

Dalam perkembangannya, Drs. Sensen menyebut dirinya Presiden NII. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu sejumlah menteri. Mereka adalah DRS, adik kandung Sensen, sebagai Menteri Sekretaris Negara; DM, kakak Ipar Deden, sebagai Menteri Dalam Negeri; A, kakak kandung Deden, sebagai Menteri Pendidikan Nasional; ER sebagai Menteri Keuangan; dan LH sebagai Menteri Perencanaan/Bappenas. Uniknya, jabatan-jabatan yang diberikan langsung melalui penunjukan tanpa *reserve* oleh sang presiden ini, tanpa ada tugas yang pasti. “Pokoknya tergantung perintah Pak Sensen,” demikian dikatakan para menteri yang siap taat dan patuh 100% terhadap apapun perintah pimpinannya.²⁹

Ketaatan pada pemimpin memang menjadi corak kuat gerakan ini. Apapun yang dikatakan sang pemimpin, bahkan sesuatu yang aneh dan irrasional,³⁰ pasti

²⁸ Wawancara dengan Sensen Komara, 7 Juni 2011. Menurut Sensen, proses penentuan dirinya sebagai penerus kepemimpinan DI Fillah dilakukan dengan meminta para pengikutnya melakukan sholat hajat dan meminta petunjuk dari Allah. Hasilnya, para pengikutnya mendaulat dirinya menggantikan ayahnya, Bakar Misbah, memimpin dan membimbing warga DI Fillah.

²⁹ Wawancara dengan Sensen, 7 Juni 2011, dan dengan LH dan DRS pada 7 dan 8 Juni 2011. Karena penunjukan menjadi menteri dilakukan secara langsung dan pribadi oleh Sensen, maka diantara para menteri tidak tahu susunan lengkap kabinet NII ini. Sensen sendiri hanya mengatakan bahwa segala berkas, termasuk susunan pemerintahannya, sudah disita pihak keamanan/Kodim, dan tidak ada lagi berkas kenegaraan yang tersisa.

³⁰ Sosok Sensen memang unik. Dalam beberapa kesempatan, termasuk ketika peneliti mewawancara

ditaati dan dilaksanakan. Ketaatan seperti ini pula yang senantiasa ditekankan dan diterapkan kepada para warga NII, sebagaimana Kartosoewiryo lakukan pada pengikutnya dulu sehingga bisa bertahan 13 tahun perjuangannya. Sensen bahkan dengan tegas menyatakan bahwa beberapa perintahnya memang aneh dan irrasional, namun hal itu sengaja ia perintahkan juga untuk menguji sejauhmana ketaatan dan kepatuhan warganya pada dirinya sebagai pimpinan.³¹ Misalnya ketika pada 2008 Sensen memerintahkan pengibaran bendera merah putih dengan bulan bintang di tengah, bendera NII, di depan rumahnya. DRS, sebagai adik, sempat bertanya dan meminta Sensen mempertimbangkannya karena dinilai dapat membahayakan. Namun hal itu tetap diperintahkannya tanpa keraguan sedikitpun. Konon perintah itu datang melalui mimpi.

Pengibaran bendera NII pada Januari 2007 itu sendiri adalah bentuk deklarasi NII. Ketika itu deklarasi dihadiri ratusan warga NII dari berbagai daerah di Garut dan luar Garut, dan dilakukan di lapangan depan rumah kediaman Alm. Bakar Misbah. Lokasi berada di

beliau, ada beberapa pembicaraan dan tingkahnya yang di luar akal sehat dan kewajaran. Misalnya diceritakan DRS, suatu saat Sensen hendak diamankan, ia lalu menggunakan HP-nya menelpon malaikat langit agar tidak turun ke bumi. Saat diwawancara peneliti (7/6/2011), Sensen menunjukkan sejumlah buku tebal yang mengklaim penulisnya adalah Imam SMK, kakeknya, dll. Padahal peneliti tahu betul siapa penulis buku-buku itu. Lebih jauh, dulu saat dibawa ke pengadilan atas dugaan makar pengibaran bendera NII, Sensen dibebaskan karena dinilai mengidap gangguan jiwa. Uniknya, meski masyarakat luar (atau bahkan dalam) NII sebagian menganggapnya *majnun* atau gila, namun hal itu tidak mengurangi kharismanya sebagai pemimpin, dan pengikutnya tetap taat dan patuh atas apa yang diperintahkannya.

³¹ Hal ini dikatakan DRS, wawancara pada 7 dan 8 Juni 2011.

Kampung Babakan Cipari, Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, sekitar 28 km dari pusat alun-alun kota Garut. Atas dasar tuduhan makar, peristiwa pengibaran bendera NII ini kemudian menyeret Sensen dan beberapa menterinya ke penjara. Sensen urung disidangkan karena diindikasikan mengalami gangguan kejiwaan, sedangkan dua menterinya menjalani 3,5 tahun penjara atas tindakan makar ini.

Sebagai pelanjut gerakan DI, asas dan ideologi NII Sensen adalah Islam. Demikian juga, hukum yang berlaku adalah hukum Islam—meski dalam pelaksanaannya semua tergantung ‘atas perintah’ sang Imam, Sensen Komara. Dikatakan dalam Qanun Asasy (konstitusi) DI/NII, Bab I Pasal 1 dan 2, sebagai berikut:

Pasal 1

1. Negara Islam Indonesia adalah Negara Karunia Allah SWT kepada bangsa Indonesia.
2. Sifat Negara itu jumhuriyah (republik) dengan sistem pemerintahan federal.
3. Negara menjamin berlakunya syari’at Islam di dalam kalangan kaum muslimin.
4. Negara memberi keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya dalam melakukan ibadahnya.

Pasal 2

1. Dasar dan hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Islam.
2. Hukum yang tertinggi adalah Al-Qur’an dan Hadits sahih.

Sebagai gerakan, NII Sensen tidak terlalu agresif dalam melakukan pengembangan dakwah ideologinya, termasuk rekrutmen keanggotaan. Tidak

ada tim pendakwah atau upaya-upaya penggalangan massa. Jikapun ada pengajian Malam Jum’at oleh Sensen, hal itu hanya dilakukan di rumah (*basecamp*) NII di Babakan Cipari, dan hanya ditujukan pada warga NII. Pertambahan jumlah warga NII hanya terjadi melalui kawin-mawin dan pertambahan alamiah keturunan. Karenanya, tidak ada angka pasti mengenai jumlah warga NII Sensen saat ini, selain informasi ada sekitar 3.000 hingga 3.500 nama warga NII pada 2001 yang waktu itu diserahkan ke Kodim dan Kodam.³² Di Babakan Cipari sendiri diindikasikan hanya sedikit, 6 atau 7 KK saja. Menurut Tim Pakem, NII di Garut mengklaim warganya ada sekitar 5000 orang, dan se-Indonesia sekitar 30 juta orang. Hanya saja hal itu sulit dibuktikan, misalnya dengan tidak adanya aktivitas mengkhawatirkan dan pertemuan pun jarang sekali, meski Pakem terus memantau gerakan ini.³³

Aktivitas gerakan NII Sensen memang *soft* dan terkesan sangat tergantung perintah pimpinan. Jauh dari kesan NII yang mewacana di publik Jakarta tentang *brainwashing*, penipuan, dan sebagainya. Ketika dimintai pendapatnya tentang gerakan-gerakan sejenis lainnya, Sensen mengatakan:

“Ah, sama saja, itu hanya taktik dan strategi untuk mencapai tujuan.. Saya pakai *Fillah*, seperti ini modelnya, tetapi kalau yang Komando Jihad kan perang-perangan.... Ada yang gayanya seperti

³² Peneliti sudah mendatangi Kodim 0611 Garut pada 9 Juni 2011 dalam rangka menelusuri data ini. Hanya saja pimpinan dan pejabat berkaitan tidak berada di tempat untuk suatu kegiatan luar kantor. Pejabat Intel Kodim yang ditemui tidak bersedia memberikan pernyataan atau data bersangkutan, atas alasan batasan kewenangan.

³³ Wawancara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Garut, pada 9 Juni 2011.

Abu Bakar Baasyir, gayanya model seperti itu. Ada yang seperti Pak Bambang (Susilo Bambang Yudhoyono, *pen.*), memegang pemerintahan seperti ini.. .Sama.”³⁴

Searah dengan aktivitas pasifnya ini, meski memiliki Menteri Keuangan, NII Sensen tidak menonjol dalam penggalangan dana.³⁵ Kebutuhan perjuangan dibebankan pada, atau ditanggung oleh, uang pribadi warga yang beraktivitas dalam berbagai lapangan kerja.

Di lokasi sekitar Babakan Cipari, warga NII dan non-NII berbaur dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Tidak ada perbedaan, bahkan warga NII pun ber-KTP biasa layaknya warga non-NII. Beberapa diantaranya aktif sebagai PNS di sejumlah instansi. Tidak ada batas tegas wilayah negara sebagaimana dibayangkan sebuah negara tersendiri.

2. NII sebagai Gerakan Keagamaan

Kata kunci dalam melihat NII Sensen sebagai gerakan keagamaan ialah adanya Imam, pimpinan, dan semua warga taat dan patuh pada perintah sang Imam, Sensen. Baik dalam hal pemahaman maupun ritual, warga NII bergerak

sesuai perintah Sensen. Satu hal lagi, dalam perjalanan kehidupan keagamaannya NII Sensen senantiasa menisbatkan pada perjalanan sunnah Rasul atau sejarah Islam masa lalu.

Terdapat sejumlah keunikan gerakan Sensen dibandingkan warga muslim pada umumnya. Kelompok ini pernah pada suatu masa, sekitar 2007-2009, melakukan perubahan atas syahadat, menjadi “*asyhadu an la ilaha illal Lah, wa asyhadu anna Sensen rasulullah.*” Selain itu, mereka pernah memutar arah kiblat dari Barat ke Timur.³⁶ Pada Ramadhan 2009 lalu, kelompok ini juga memindahkan puasa wajib Ramadhan pada bulan Jumadil Awal, selama 24 hari. Semua dilakukan atas perintah sang Imam, Sensen Komara, yang menerima perintah-perintah ini dari Tuhan melalui mimpi.³⁷ Atas ‘keunikan’ paham dan pengamalan agama ini, sejumlah warga NII diajukan ke meja hijau dan dijatuhi hukuman 6 bulan atas dasar penodaan agama.

Warga NII Sensen menerima pengajaran keagamaannya dari Sensen dan pengkajiannya sendiri atas Al-Quran dan buku-buku lainnya. Tidak ada pen-

³⁴ Wawancara dengan Sensen Komara, pada 7 Juni 2011. Sebuah sumber dalam wawancara tanggal 8 Juni 2011 menengarai adanya kaitan NII Sensen dengan NII Al-Zaytun. Menurut penuturannya, salahsatu konseptor NII Sensen adalah seseorang yang berada di Indramayu (di Al-Zaytun?). Hanya saja informasi ini belum terkonfirmasi atas sejumlah alasan.

³⁵ Informasi lain disampaikan DH, warga non-NII di Babakan Cipari. Bahwa terdapat penggalangan infak bahkan sampai 70% dari warga NII Sensen yang disalurkan untuk kepentingan perjuangan. Hanya saja, informasi ini sulit mendapat konfirmasi dari pihak-pihak bersangkutan. Pengumpulan informasi/testimoni warga NII lain dimaksud sejatinya diperlukan, namun penelitian ini belum mampu menjangkaunya.

³⁶ Terhadap sejumlah keunikan pengamalan agama ini, kelompok ini memiliki argumen yang didasarkan pada sejumlah ayat dan sunnah. Dalam buku *Argumentasia dan Kacamata Sunnah* hal-hal ‘aneh’ itu mendapat penjelasan yang seakan-akan rasional dan *justifiable*. Tentang kerasulan, misalnya, mereka meyakini akan kedatangan rasul di setiap zaman sebagaimana ayat *likulli ummatin rasul* (tiap-tiap umat mempunyai rasul). Tentang perubahan arah kiblat, mereka merujuk pula pada sejarah Nabi Muhammad sesaat setelah Isra Mi’raj dan turun perintah salat. Kala itu Nabi shalat menghadap ke Selatan lalu pindah ke Utara. Peristiwa perubahan kiblat ini kemudian mendapat respon dari musyrikin dan munafikin saat itu sebagaimana diceritakan QS. Al-Baqarah:142-143. Demikianlah, setiap fenomena kekinian selalu mendapat penjelasan kontekstual dari sejarah Nabi masa lalu. Selengkapnyanya dalam buku *Argumentasia dan Kacamata Sunnah* (tidak diterbitkan).

³⁷ Wawancara dengan DRS pada 7 dan 8 Juni 2011

didikan atau diseminasi pengajaran khusus yang diberikan. Pengalaman dan motivasi keagamaannya mengalir alamiah, terkecuali mendapat arahan dan perintah tertentu dari sang Imam. Bahwa saat ini, syahadat, shalat, arah kiblat, dan puasa warga NII sudah kembali kepada kebiasaan muslim pada umumnya.

Sebagai seorang lulusan Fakultas Ushuluddin, Sensen Komara memang cukup fasih bicara agama dan dihormati kepintarannya. Bahwa ada sejumlah keganjilan dalam pendapat-pendapat keagamaannya, hal itu tetap dipandang positif oleh pengikut setianya yang tak bergeming dengan pandangan masyarakat terhadapnya. Suatu keganjilan selalu dipahami sebagai keistimewaan yang dipahaminya sebagai *sunatullah* seorang pembaharu. DRS, misalnya, menyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembaharu seringkali mengabarkan berita aneh yang tidak dipahami masyarakat saat itu. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang irrasional dapat diimani tanpa *reserve* oleh para pengikut Nabi Muhammad, misalnya. Demikian juga perintah mimpi pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anak kesayangannya, semua di luar rasio umat pada masanya. Hal-hal itulah yang menguatkan warga NII Sensen atas keanehan-keanehan pendapat Sensen saat ini.³⁸

B. Pandangan NII tentang Empat Pilar

“Pancasila itu Islam sekali,” kata DRS.³⁹ Pendapat ini searah dengan

³⁸ Wawancara dengan DRS pada 7 dan 8 Juni 2011

³⁹ Wawancara dengan DRS, 7 Juni 2011. Bandingkan dengan pergulatan pemaknaan Pancasila dalam Adian Husaini, *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009. Bahwa penilaian NII Sensen tentang Pancasila ini dalam pemaknaan yang mana Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi jiwa dari sila-sila lainnya.

pendapat SMK ketika diadili di Mahkamah AD tahun 1962, bahwa “...sekarang Kartosuwiryo juga bersedia menerima Pancasila sebagai dasar negara, karena dia melihat bahwa komunisme dalam NASAKOM berada di tempat ketiga.”⁴⁰ Demikian juga, dalam surat permohonan grasi SMK kepada Presiden Soekarno tertanggal 20 Agustus 1962, atas dakwaan hukuman mati di sidang Mahkamah AD tahun 1962 tersebut. Tertulis dalam surat grasi itu: “..rasa penyesalan yang sebesar-besarnya atas segala perbuatan di masa lampau” ...”sanggup berkelakuan sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang baik dalam alam Pancasila.”⁴¹ Demikian juga bunyi ikrar para warga DI di kantor Gubernur Jawa Barat pada 1 Agustus 1962, dan ikrar penanggungjawab DI Fillah ke-2, Bakar Misbah, di Kodam VI Siliwangi pada tahun 1985. Pada kedua ikrar ini tegas dinyatakan “selalu berusaha menjadi warga negara RI yang taat, baik dan berguna dengan dijiwai Pancasila.”⁴²

UUD 1945 yang asli (sebelum diamandemen) dinilai NII Sensen baik dan justeru seharusnya dilaksanakan secara konsisten oleh segenap pemerintah bangsa ini. NII Sensen berpandangan UUD yang sekarang berlaku sudah tidak murni lagi, sudah bukan UUD 1945. Dengan UUD ini keadaan negara semakin tercabik-cabik, sejumlah pulau mulai lepas, dan tidak ada suatu peraturan yang pasti. Misalnya, mereka memandang bahwa Pemilu tahun 1999 adalah pelanggaran atas UUD 1945 karena saat itu belum diamandemen padahal dalam pasalnya berbunyi Pe-

⁴⁰ Holk H. Dengel, *op.cit.*, hlm. 197.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 206.

⁴² Daud, dkk., *Argumentasia*, hlm, 77-78.

milu dilaksanakan setiap 5 tahun. Kala itu pemerintahan Soeharto baru 2,5 tahun. Atas pelanggaran UUD 1945 itu mereka berpendirian untuk tidak ikut terlibat dalam kesalahan yakni dengan tidak terlibat dalam Pemilu tersebut. Sensen mengklaim mereka yang tidak ikut Pemilu pada 1999 (warga DI, anggota TNI/Polri) sebagai warganya. Demikian juga Pemilu 2004, mereka tidak mau ikut mencoblos karena, meski UUD 1945 sudah diamandemen, namun dinilai belum ada pengakuan kesalahan atas pelanggaran UUD 1945 pada Pemilu 1999 di atas.

Tentang kebhinnekaan, NII Sensen berpendapat hal itu merupakan keniscayaan. Bahwa wilayah negara yang dimilikinya adalah dari Sabang sampai Merauke, yang tentunya beragam suku bangsa dan agamanya. Bahkan, dalam hal negara akan melaksanakan hukum Islam, umat agama lain akan diajak komunikasi (*bergaining*) tentang apa yang baik untuk dilaksanakan.⁴³

Konsep NKRI memang yang paling menjadi ganjalan. Mereka menolak konsep yang dinilai cacat konstitusional ini. Titik pangkalnya sesungguhnya jauh sebelumnya. Ketika telah empat tahun Negara Republik Indonesia berdiri, dan kemudian pada 1950 atas dasar perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) diubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan menggunakan UUD Sementara (UUDS), kemerdekaan bangsa Indonesia mulai runtuh. Di dalam format RIS tersebut wilayah RI menjadi hanya 8 keresidenan

di Jawa dan Sumatera, dan Irian diserahkan pada Belanda. Selanjutnya, setelah Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali pada UUD 1945, Pemerintah saat itu mengukuhkan kembali keterikatannya pada perjanjian KMB, di mana sistem hukumnya harus mengikuti hukum Belanda (sesuai penyeragaman hukum hasil Pertemuan di Jenewa pada Maret 1931). Di masa Orde Baru, Indonesia memang kembali menggunakan UUD 1945 dengan bentuk NKRI. Hanya saja di penghujung masa ini terjadi pula pengkhianatan dengan pelaksanaan Pemilu 1999 yang dinilai menyalahi pasal 7 dan 8 UUD 1945. Demikian juga pasca reformasi, NKRI yang melanjutkan orde sebelumnya bahkan dengan diamandemennya UUD 1945 oleh anggota dewan hasil Pemilu 1999 yang dianggap tidak sah, maka NKRI dan UUD 1945 asli dianggap telah hilang. Yang ada hanyalah NKRI 'baru' hasil pengkhianatan NKRI 1945 dan UUD 1945 asli.⁴⁴ Dinyatakan DRS dan ER:⁴⁵

Negara yang ada pada saat ini di Indonesia adalah NKRI bukan RI-1945. Berubahnya RI menjadi NKRI setelah mengkhianati pasal (7) dan Pasal (8) UUD-45 dan Undang-undang Pemilu. Pada tanggal 7 Juni 1999 Pemerintah Indonesia mengkhianati Negara Republik Indonesia dengan mengadakan Pemilu, di mana telah ditetapkan bahwa Pemilu diadakan lima tahun sekali, tetapi pada tanggal 7 Juni 1999 Pemilu telah diadakan dua tahun sekali. Pemilu ini diadakan dengan melanggar

⁴³ Wawancara dengan DRS pada 7 dan 8 Juni 2011. *Bergaining* ini pula sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Ayat (4) Qanun Asasy yang berbunyi: "Negara memberi keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya dalam melakukan ibadahnya."

⁴⁴ Daud, *op.cit.*, hlm. 44-78.

⁴⁵ Deden Rahayu Setiana dan Endi Rustandi, *Kacamata Sunnah, Aplikasi Sunnah dalam Menyelamatkan Negara Indonesia melalui Konversi*, Penjelasan NII di Pengadilan Negeri Garut, Oktober 2008., hlm. ii-iv.

dan mengkhianati Undang-undang Dasar 1945. Yaitu:

Pasal (7) : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal (8) : Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Hasil dari pengkhianatan pasal (7) dan pasal (8) UUD-45 terbentuknya:

1. Legislatif, yang terdiri dari DPD dan DPR.
2. Eksekutif, yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden.
3. Yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudikatif.
4. Amandemen.
5. RI menjadi NKRI.

Berdasarkan *standing point* tersebut di atas, selanjutnya dikatakan simpulan DRS dan ER, sebagai berikut:

Dengan biodata negara dan struktur ketatanegaraan di atas, jelaslah bahwa Negara Republik Indonesia sudah tidak ada. Dan RI sudah diganti dengan negara baru hasil pengkhianatan terhadap RI-45 yaitu Negara NKRI. Dengan demikian, NKRI tidak sah secara hukum. Dan karena tidak sah secara hukum, maka NKRI tidak akan mampu menjadi juru selamat bagi Bangsa Indonesia, Rakyat Indoneia dan Negara Indonesia. Karena RI sudah mati, maka Bendera Merah Putih yang berkibar sekarang ini bukanlah milik RI. Bendera Merah Putih yang sekarang ini berkibar di NKRI itu adalah

hasil kecurangan politik yang dilakukan oleh NKRI.⁴⁶

IV. ANALISIS

Teorinya, anasir pendukung sebuah negara adalah organisasi, perangkat (pimpinan dan warga), sistem/aturan, dan wilayah kekuasaan. NII Sensen nampaknya tidak memenuhi hal itu, setidaknya jika kita percaya pada sejarah pembentukan dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia— yang dalam satu dan lain hal berbeda dengan pemahaman sejarah yang dipakai oleh Sensen dan pengikutnya. Wilayah negaranya yang mengklaim berada di wilayah NKRI ini juga, misalnya, sulit dipahami melalui perpektif Georg Jellinek yang meniscayakan kekuasaan yang berkediaman di wilayah tertentu. Istilah ‘negara bayangan’ tak dikenal dalam ilmu pemerintahan dan administrasi masa kini. Bahwa kemunculan kelompok ini sebagai sintesis kemerdekaan individual dan universal sebagaimana Hegel dapat diterima, hanya saja kehadirannya bukan pada ruang kosong melainkan ada suatu konteks kehidupan masyarakat.

Melihat performa organisasi dan sistem yang berjalan (bukan yang dicitakan) maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah organisasi/lembaga masyarakat yang menggunakan istilah negara dengan serangkaian perangkat keorganisasiannya. Adapun potensi massa pengikut yang cukup besar semata karena khairisma pimpinan yang ditularkan atau dibentuk dari kondisi historis tertentu, yakni bahwa sang pemimpin adalah penerus perjuangan gerakan DI yang ideologis itu.

⁴⁶ *Ibid.*

Dengan menggunakan lima dimensi religiusitas Glock dan Stark, sulit menyebutkan gerakan NII ini bukan sebagai gerakan keagamaan. Dalam gerakan NII Sensen, ada ritual yang dipraktikkan warganya bahkan yang berbeda dengan *mainstream*, misalnya dengan shalat beda kiblat, puasa wajib di luar Ramadhan, dan sebagainya. Dimensi ideologis juga terlihat ketika warga NII menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya yang disampaikan Sensen. Misalnya kepercayaan tentang adanya Tuhan, malaikat, kitab-kitab, dan bahkan Sensen sebagai rasul. Dimensi intelektual dan dimensi pengalaman terpenuhi dengan adanya warga NII yang memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dengan taat tanpa *reserve*. Sedangkan dimensi konsekuensial terlihat jelas ketika para warga NII sedemikian termotivasi oleh ajaran Sensen—seandainya pada tataran visual.

Gerakan NII Sensen muncul di era kebebasan berpendapat dan menokoikkan figur Sensen sebagai imam dan presidennya. Sang Imam melakukan interpretasi teks/konteks sehingga menelurkan pendapat-pendapat keagamaan tertentu. Terjadi pula pelembagaan ajaran dengan pengajian-pengajian Malam Jumat. Yang pasti, ada sesuatu perubahan yang ditawarkan. Hal-hal ini menegaskan NII Sensen juga merupakan gerakan keagamaan. Kemunculan ajaran NII Sensen ini pun tergolong memurnikan atau mendobrak kemapanan pemahaman *mainstream*, menjadikan Sensen sebagai amir, dan mencita-citakan Islam sebagai alternatif pengganti sistem yang telah ada. Hal-hal ini mengamini asal-usul lahirnya suatu gerakan keagamaan sebagaimana dikatakan Tholkhah dan Azis. Hanya saja, selain lima dimensi Glock and Stark di atas, kajian terhadap

NII Sensen ini perlu dilengkapi kajian Richard R. Clayton dan James W. Gladden, yang melihat kemungkinan adanya *multi phenomenon* dalam varian bentuk religiusitas di luar agama-agama atau kepercayaan yang mapan.⁴⁷ Adanya faktor kharisma-bawaan pada Sensen, misalnya, penting dilihat sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan.

Tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, yang sejatinya menjadi pegangan dan penopang kehidupan berbangsa dan bernegara, NII Sensen belum penuh memegangnya. UUD 1945 yang dilaksanakan tidak secara benar dikritiknya, sedangkan konsep NKRI tidak disepakatinya karena ada tawaran Negara Islam Indonesia, meski dengan struktur dan personil yang boleh saja tetap. Mereka menyebutnya dengan istilah ‘konversi’, yakni mengkonversi NKRI menjadi NII dengan struktur pemerintahan dan bahkan orang-orangnya seperti sekarang ini, hanya saja sistem hukumnya Islam dengan memungkinkan negosiasi tertentu dalam pelaksanaannya.⁴⁸

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan dan analisa kasus ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Secara keorganisasian, NII Sensen belum memenuhi syarat dikatakan sebagai sebuah negara, karena ketia-

⁴⁷ Richard R. Clayton dan James W. Gladden, “The Five Dimensions of Religiosity: Toward Demythologizing a Sacred Artifact”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 13, No. 2. (Jun., 1974), pp. 135-143.

⁴⁸ Selengkapnya baca Deden Rahayu Setiana dan Endi Rustandi, *Kacamata Sunnah, Aplikasi Sunnah dalam Menyelamatkan Negara Indonesia melalui Konversi*, Penjelasan NII di Pengadilan Negeri Garut, Oktober 2008.

daan wilayah tersendiri dan perangkat sistem yang utuh tentang suatu negara. Pelabelan 'negara' pada gerakan ini lebih disebabkan aspek historis dan ideologis pada gerakan serupa sebelumnya. Sedangkan sebagai gerakan keagamaan, NII Sensen dapat terkategori suatu gerakan keagamaan karena terpenuhinya lima dimensi religiusitas. Gerakan keagamaan ini menokohkan pemimpinnya, presiden sekaligus imam, sebagai pemegang otoritas tertinggi dan sekaligus sebagai sumber pelaksanaan hukum.

2. Beranjak dari posisinya sebagai kelanjutan gerakan DI/NII, NII Sensen berpendapat Pancasila sudah Islami, dan kebhinnekaan adalah hal yang dapat diterima sebagai *sunatullah*. Sedangkan UUD 1945 dinilai telah dilanggar, misalnya dengan dilakukannya Pemilu 1999 dan perubahan UUD (amandemen). Sejalan dengan itu, eksistensi NKRI pun mereka anggap tidak sah karena hasil suatu pengkhiatan politik. Untuk itu, NII Sensen menawarkan sebetuk 'konversi' dari NKRI menjadi NII, demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia.

B. Rekomendasi

Dari sejumlah kesimpulan tersebut di atas dapat direkomendasikan sejumlah hal, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pendekatan persuasif terhadap gerakan NII Sensen, karena meski sejauh ini belum dinilai makar atau membahayakan, namun potensi ketidakrukunan sangat dimungkinkan dari paham keagamaannya yang kerap kali 'aneh' dan muncul dari seseorang yang kharisma kuatnya dipatuhi tanpa *reserve*.

Dari segi paham kebangsaan, meski bercita-cita sesuatu ideologi lain tidak dapat dilarang dalam ruang demokrasi Indonesia, namun jika sudah memiliki potensi makar dan merongrong NKRI perlu dikondisikan agar selaras. Persuasi dapat dilakukan dengan dialog keagamaan oleh Kementerian Agama dan dialog kebangsaan oleh Kementerian Dalam Negeri. Termasuk dalam persuasi ini adalah alternatif melakukan 'rekonsiliasi nasional' gerakan-gerakan NII atau eks-DI/TII dengan Pemerintah saat ini. Serupa rekonsiliasi ini misalnya berhasil dilakukannya kesepakatan Helsinki antara RI-GAM. Meski tidak mudah, upaya ini kiranya akan membuka pintu komunikasi yang lebih mendekatkan pada penanganan komprehensif gerakan-gerakan separatis, anti-negara, atau makar negara.

2. Perlu sosialisasi wawasan dan implementasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada kelompok-kelompok agama dan politik yang berpotensi berhadapan-konseptual dengan 4 pilar tersebut. Dalam tingkat tertentu, upaya ini penting sebagai upaya memoderasi gerakan-gerakan masyarakat. Hal ini penting untuk menjamin terciptanya NKRI yang kokoh dan berjalannya pembangunan yang berkesinambungan tanpa gangguan internal sebagai bangsa dan negara. Bentuk sosialisasi bisa dilakukan dalam sesi-sesi pertemuan, atau dalam bentuk yang lebih partisipatif, misalnya *live-in* bersama dengan mereka dalam aktivitas kehidupan sehari-hari (*participatory action research*).
3. Pimpinan dan para pemuka agama

perlu meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat yang selaras dengan wawasan kebangsaan Indonesia. Upaya dapat dilakukan dengan melakukan intensifikasi dialog multikultural dan multireligius, sehingga suasana multikultur tercipta dalam ruang masyarakat. Di sisi lain, terhadap aktivitas yang mengarah pada makar atau penodaan agama dapat diambil tindakan hukum dengan tegas.

4. Kiranya perlu dilakukan kajian lanjutan yang memberi pendalaman pada beberapa titik penelitian ini. Misalnya, penelusuran mengenai kaitan NII Sensen dengan varian NII lainnya; perbandingan persepsi kalangan elit dan *grassroot* NII Sensen tentang 4 pilar dimaksud; atau kajian lanjutan lainnya dengan dana dan waktu yang lebih memadai.

* * *

DAFTAR PUSTAKA

Buku/dokumen:

- Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Azis, Abdul, *Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.
- Borgatta, Edgar F., *Encyclopedia of Sociology*, USA: McMillan, 2000.
- Daud, dkk, *Argumentasia: a New World Religion and the Man From the East*, Penjelasan NII di Pengadilan Negeri Garut, 2009.
- Dengel, Holk H., *Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo: Angan-angan yang Gagal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet.II, 2011.
- Dijk, Cees van, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Hegel, GWF., *The Philosophy of History*, Canada: Batoche Books, 2001.
- Husaini, Adian, *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Ismail, Faisal, *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: a Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila*, Disertasi, *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: a Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila*, Disertasi, McGill University, 1995.
- Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2011.
- Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*, Jakarta: The Wahid, 2011.
- Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi*, Jakarta: Moderate Muslim Society, 2011.
- Lampiran Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pada

- Buku II Bab II tentang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Mufid, Ahmad Syafii, *Radikalisme Al Jama'ah Al Islamiyah: Diskursus Politik*, disertasi pada UIN Yogyakarta, 2011.
- Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Jkt: SETARA, 2011.
- Poloutzian, F.R., *Psychology of Religion*. Massachusetts: A Simon & Schuster Comp., 1996.
- Setiana, Deden Rahayu, dan Endi Rustandi, *Kacamata Sunnah, Aplikasi Sunnah dalam Menyelamatkan Negara Indonesia melalui Konversi*, Penjelasan NII di Pengadilan Negeri Garut, Oktober 2008.
- Solahudin, *NII sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2011.
- UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundangan-undangan
- Wasis, Widjiono, *Geger Talangsari: Serpihan Gerakan DI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Situs Internet:
- <http://bataviase.co.id/node/677148>, diunduh pada 3 Juni 2011.
- <http://bataviase.co.id/node/182232>, diunduh pada 4 Juni 2011.
- <http://www.tempointeraktif.com/khusus/selusur/kartosoewirjo/page23.php>, diunduh 4 Juni 2011.
- <http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Georg+Jellinek>, diunduh pada 5 Juni 2011.